



**JAFM:**  
**Journal of Accounting and  
Finance Management**

E-ISSN: 2721-3013  
P-ISSN: 2721-3005

<https://dinastires.org/JAFM>    [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Sumbagsel Menggunakan Model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK)

Izza Aulia Rachmadina<sup>1</sup>, Robinson Robinson<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, [izzarhmdna@gmail.com](mailto:izzarhmdna@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, [robin76kph@gmail.com](mailto:robin76kph@gmail.com)

Corresponding Author: [izzarhmdna@gmail.com](mailto:izzarhmdna@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyze the financial condition of local governments in the southern part of Sumatra (Sumbagsel) using the Financial Trend Monitoring System (FTMS) model. FTMS uses two main factors, namely financial factors consisting of 3 dimensions with 15 indicators and environmental factors consisting of 1 dimension with 3 indicators. A quantitative descriptive approach was utilized, relying on secondary data from the Audit Results Report (LHP) on Local Government Financial Statements (LKPD) and demographic data from 2019 to 2023. The study's population consisted of 60 local governments, and a non-probability sampling technique using saturated sampling was employed. The study results show that more than 50% of local governments in Sumbagsel exhibit poor regional debt management, highlighted by declining debt structure indicators. City governments face high unemployment rates, averaging 5,33-7,04%, while district governments show low financial independence due to reliance on central and provincial funding, this is indicated by high intergovernmental ratios averaging 0,84-0,91 and low values for Regional Original Income (PAD), with independence ratios and PAD per expenditure averaging 0,07-0,10.*

**Keywords:** *Financial Condition, Local Government, Financial Trend Monitoring System (FTMS)*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) menggunakan model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK). SPTK menggunakan dua faktor utama yaitu faktor keuangan yang terdiri dari 3 dimensi dengan 15 indikator perhitungan dan faktor lingkungan yang terdiri dari 1 dimensi dengan 3 indikator perhitungan. SPTK dipilih karena indikator pengukuran yang komprehensif dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berasal dari data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan data demografi wilayah Sumbagsel tahun 2019-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah 60 pemerintah daerah kabupaten dan kota wilayah Sumbagsel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan cara *sampling* jenuh. Hasil penelitian menunjukkan lebih dari

50% pemerintah daerah wilayah Sumbagsel memiliki pengelolaan utang daerah yang buruk ditandai dengan cenderung menurunnya indikator-indikator perhitungan pada dimensi struktur utang. Pemerintah kota cenderung memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 5,33-7,04%, sedangkan pemerintah kabupaten cenderung memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah karena masih bergantung pada sumber dana pemerintah pusat dan provinsi ditandai dengan tingginya nilai indikator rasio antarpemerintah sebesar rata-rata 0,84-0,91 serta perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat rendah ditandai dengan rendahnya nilai indikator rasio kemandirian dan rasio PAD per belanja sebesar rata-rata 0,07-0,10.

**Kata Kunci:** Kondisi Keuangan, Pemerintah Daerah, Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK)

---

## PENDAHULUAN

Asas otonomi memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (*UU Nomor 23 Tahun 2014*). Salah satu bagian dari otonomi daerah adalah desentralisasi pengelolaan keuangan, dimana desentralisasi ini memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri seperti pendapatan, belanja, dan pendanaan (Frans Marhuasa Simamora et al., 2024; Priyono et al., 2020). Aspek desentralisasi ini juga merupakan bentuk penyerahan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Primawaty, 2020).

Pemerintah daerah di Indonesia pada tingkat provinsi, kota dan kabupaten, harus menyiapkan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (*PP Nomor 12 Tahun 2019; UU Nomor 1 Tahun 2022*). Laporan keuangan ini harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (*UU Nomor 23 Tahun 2014*).

Pemerintah daerah menyiapkan laporan keuangan eksternal pada akhir tahun fiskal yang patuh terhadap audit independen. Laporan keuangan memberikan informasi tentang nilai total aset, total utang, aset bersih, total pendapatan, total pengeluaran, dan arus kas masuk dan keluar (Ritonga et al., 2012). Memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) memang sangat penting, namun sejatinya opini tersebut hanya menekankan bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan semua hal dalam kondisi material (Rivenbark et al., 2010). Namun, hingga saat ini laporan keuangan yang telah diaudit tidak memberikan informasi kepada pengguna tentang kondisi keuangan atau kesehatan keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya.

Analisis kondisi keuangan yang sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat mengukur dan mengevaluasi kondisi keuangan daerahnya, mengidentifikasi kapasitas, dan mengetahui area yang memiliki masalah potensial (Ritonga et al., 2012). Analisis kondisi keuangan berfungsi sebagai peringatan awal (*early warning system*) ketika indikator dalam pengukurannya menunjukkan kondisi tidak baik (Rahayu et al., 2023) dan juga hasil dari analisis kondisi keuangan ini dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi, mencegah, dan mengatasi berbagai masalah keuangan di tingkat daerah, sehingga para *stakeholder* dan pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat dalam mengambil keputusan terkait kebijakan keuangan di masa mendatang (Maizunati, 2017; Maulina & Rhea, 2019).

Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang telah membahas tentang kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa celah yang perlu diperhatikan seperti

penelitian sebelumnya cenderung hanya memperhatikan faktor keuangan saja dan mengabaikan faktor lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah. Model analisis yang cukup relevan untuk digunakan dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan saat ini adalah model yang dikembangkan oleh *International City/County Management Association* (ICMA) yang diberi nama Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK) (Ritonga, 2023).

SPTK dikembangkan oleh ICMA sebagai metode untuk memantau kondisi keuangan pemerintah daerah. Metode ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan menetapkan indikator pengukuran yang komprehensif untuk analisisnya. Indikator ICMA dirancang untuk memberikan pemerintah daerah metode pemantauan kondisi keuangan menggunakan data yang mudah diakses dengan mempertimbangkan dua faktor utama yaitu faktor keuangan dan faktor lingkungan (ICMA, 2009). Model SPTK dalam penelitian ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatra bagian selatan (Sumbagsel) yang sebenarnya dan membantu pemerintah daerah dalam membentuk prioritas kebijakan jangka panjang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap data-data yang telah dikumpulkan sehingga mempermudah dalam interpretasi dan pengambilan keputusan (Aziza, 2023). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa LHP atas LKPD dan data demografi pemerintah daerah wilayah Sumbagsel tahun 2019-2023. Data tersebut diperoleh dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan wilayah Sumbagsel melalui <https://e-ppid.bpk.go.id/> dan Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan wilayah Sumbagsel melalui <https://www.bps.go.id/id>. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 pemerintah daerah yang terdiri dari 10 pemerintah kota dan 50 pemerintah kabupaten wilayah Sumbagsel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan cara *sampling* jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Prof. Dr. Sugiyono, 2020).

## Teknik Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengamati kondisi keuangan pemerintah daerah menggunakan model SPTK menurut Ritonga (2023):

- 1) Mengumpulkan data yang diperlukan seperti data keuangan dan data nonkeuangan selama periode tahun penelitian. SPTK merupakan model analisis yang menggunakan tren (perkembangan/perubahan antar tahun).
- 2) Membentuk kelompok acuan (*benchmark*) untuk mencapai homogenitas pada pemerintah daerah, pembagian kedalam beberapa kelompok dilakukan untuk meningkatkan *fairness* dan daya banding yang setara antar pemerintah daerah sebelum menghitung indikator untuk setiap dimensi. Pada penelitian ini pemerintah daerah akan dikelompokkan menjadi beberapa klaster berdasarkan kriteria penelitian yang dilakukan oleh (Baidori, 2020).
- 3) Menghitung indikator yang diperlukan. Pemilihan dimensi dan indikator disesuaikan dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah sehingga tidak seluruh dimensi dan indikator harus digunakan. Pemilihan dimensi dan indikator diserahkan dengan pertimbangan profesional dari masing-masing pemerintah atau peneliti. Pada penelitian ini untuk menganalisis faktor keuangan menggunakan dimensi dan indikator SPTK yang telah dikembangkan oleh (Kusnadi & Ritonga, 2017) yaitu 3 dimensi dengan 15 indikator, dimensi dan indikator tersebut telah dilakukan penyesuaian terhadap kondisi yang ada pada pemerintah daerah di Indonesia. Faktor lingkungan pada penelitian ini akan diukur menggunakan dimensi dan indikator SPTK yang dikembangkan oleh ICMA yaitu 1

dimensi dengan 6 indikator, dimana indikator yang digunakan telah disesuaikan berdasarkan ketersediaan data yang ada pada pemerintah daerah di Indonesia.

**Tabel 1. Dimensi dan Indikator Analisis SPTK**

Dimensi	Indikator	Formula	Tren	Interpretasi
Basis Pendapatan	Pendapatan per pegawai	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus Belanja Pegawai}}{\text{Total Pendapatan}}$	↑	Menunjukkan kemampuan pendapatan untuk mencukupi belanja pegawai.
	Pendapatan operasional	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus Belanja Operasi}}{\text{Total Pendapatan}}$	↑	Menunjukkan kemampuan pendapatan untuk menutupi operasional tahunan.
	Rasio Kemandirian	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$	↑	Menunjukkan kemandirian keuangan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah.
	Rasio antarpemerintah	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}}$	↓	Menunjukkan ketidaktergantungan kepada sumber dana dari pihak luar.
	Rasio PAD per belanja	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$	↑	Menunjukkan kemampuan menghasilkan pendapatan secara mandiri untuk mencukupi belanja.
Struktur Utang	Rasio kas pemerintah	$\frac{\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	↑	Menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
	Rasio kas dan piutang	$\frac{\text{Kas dan Setara Kas} + \text{Investasi Jangka Pendek} + \text{Piutang}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	↑	Menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek ketika jatuh tempo.
	Rasio asset lancar	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	↑	Menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya.
	Utang jangka pendek	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$	↑	Menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan pendapatan tahunan.
	Utang jangka panjang	$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Kewajiban}}$	↑	Menunjukkan kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.
	Pendapatan per utang	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Kewajiban}}$	↑	Menunjukkan kemampuan pendapatan untuk memenuhi beban utang.
	Keseimbangan keuangan	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan DAK} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Kewajiban}}$	↑	Menunjukkan keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kapasitas utang.
Fleksibilitas Tingkat Layanan	Pendapatan per kapita	$\frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Populasi}}$	↑	Menunjukkan kemampuan keuangan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
	Fleksibilitas keuangan	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{Belanja Operasi}}{\text{Total Pendapatan}}$	↑	Menunjukkan fleksibilitas keuangan dalam operasional untuk menyediakan layanan kepada masyarakat.
	Pemeliharaan infrastruktur	$\frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$	↓	Menunjukkan terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana untuk mempertahankan layanan kepada masyarakat.
Kebutuhan Masyarakat dan Sumber Daya	Jumlah populasi	Jumlah Penduduk (Populasi)	↑↓	Menunjukkan efektifitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
	Kepadatan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk (Populasi)}}{\text{Luas Wilayah Dalam Km Persegi}}$	↑	Menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.
	Pengangguran	Tingkat Pengangguran	↓	Menunjukkan peningkatan pendapatan suatu daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

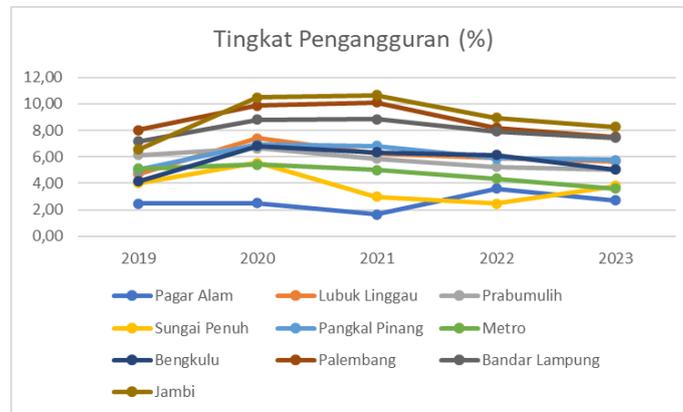
Sumber: (Kusnadi & Ritonga, 2017; Ritonga, 2023)

- 4) Peneliti membuat grafik dari hasil perhitungan rasio setiap tahun yang diteliti untuk mendapatkan arah tren. Dengan menyajikan data hasil perhitungan menggunakan grafik, akan tampak tren yang terjadi atas masing-masing indikator. Dengan demikian, dapat dianalisis kondisi tren tersebut memberikan sinyal yang diharapkan atau tidak diharapkan.
- 5) Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis hasil tren per indikator, apakah menunjukkan kondisi yang diharapkan atau tidak diharapkan.
- 6) Peneliti mengambil kesimpulan mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah kota pada wilayah Sumbagsel terdiri dari 10 daerah, dimana pada pemerintah kota cenderung memiliki pengendalian yang buruk pada dimensi kebutuhan masyarakat dan sumber daya ditandai dengan nilai indikator pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten. Indikator pengangguran pemerintah kota pada wilayah Sumbagsel berada pada rata-rata 5,33-7,04% pada tahun 2019-2023, dimana nilai tersebut masih belum mencapai target sasaran pokok dari tingkat pengangguran terbuka yang telah ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar 4-5% (Kemnaker, 2019). Pada pemerintah kota wilayah Sumbagsel tingkat pengangguran paling tinggi berada pada pemerintah kota Palembang dan Jambi yang menyentuh angka 10% pada tahun 2020 dan 2021, tingginya angka tersebut sejalan dengan kondisi Indonesia dimana pada tahun tersebut terjadi bencana alam yaitu pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan di Indonesia, termasuk ekonomi dan ketenagakerjaan. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah untuk menekan angka kasus Covid-19 mengakibatkan pembatasan aktivitas ekonomi dan pemutusan hubungan kerja bagi banyak pekerja, sehingga tingkat

pengangguran meningkat secara signifikan (Mifrahi & Darmawan, 2022; Teguh Ali Fikri, 2021). Analisis kondisi keuangan lebih lanjut pada pemerintah kota wilayah Sumbagsel dilakukan dengan membagi pemerintah kota dalam beberapa kelompok, tujuannya untuk meningkatkan *fairness* dan daya banding yang setara antar pemerintah kota.



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

**Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran**

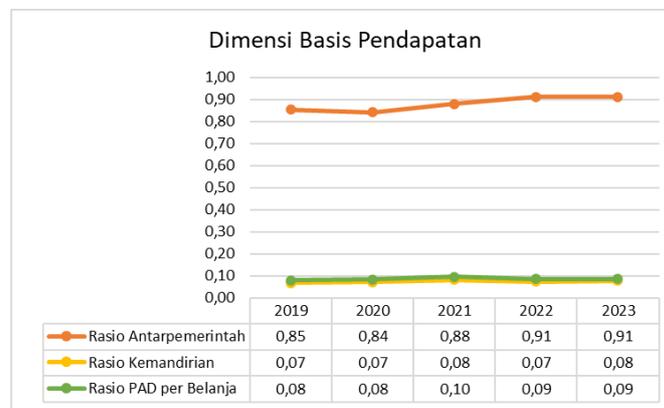
Pemerintah kota pada wilayah ini terbagi menjadi 3 kluster dimana pada kluster 1 terdiri dari 4 pemerintah kota, dari ke 4 pemerintah kota tersebut hanya 1 pemerintah kota yang memiliki kondisi keuangan yang cukup baik yaitu pemerintah kota Pagar Alam yang ditandai dengan hanya ada 2 indikator perhitungan pada dimensi basis pendapatan yang menunjukkan tren yang tidak baik yaitu terjadi penurunan pada rasio operasional dan peningkatan pada rasio antarpemerintah dari tahun awal (2019) ke tahun akhir (2023) sebesar 0,01, meskipun tergolong rendah akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota Pagar Alam memiliki kemampuan yang masih rendah dalam memperoleh pendapatan asli daerahnya. Kemudian pemerintah kota Lubuk Linggau, Prabumulih dan Sungai Penuh memiliki pengelolaan dan pengawasan yang kurang baik terhadap utang daerahnya, hal ini ditandai dengan arah tren yang fluktuatif namun cenderung menurun dari tahun awal (2019) ke tahun akhir (2023) pada indikator perhitungan dimensi struktur utang sebesar rata-rata 60%.

Kemudian pada kluster 2 pemerintah kota yang terdiri dari 3 pemerintah kota memiliki kondisi keuangan yang sama dengan kluster 1, dimana pada kluster 2 ini pemerintah kota juga memiliki pengelolaan yang buruk terhadap utang daerah, akan tetapi pada kluster ini nilai rasio antarpemerintah pada dimensi basis pendapatan rata-rata sebesar 0,78, lebih rendah 0,12 dibandingkan kluster 1, menunjukkan bahwa pemerintah kota yang berada pada kluster 2 memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghasilkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pemerintah kota yang berada pada kluster 1.

Pada kluster 3 juga terdiri dari 3 pemerintah kota dimana pada kluster ini memiliki kondisi keuangan yang paling baik di antara kluster 1 dan 2. Pemerintah kota yang paling baik pada kluster ini adalah pemerintah kota Palembang dimana nilai rasio antarpemerintah pada dimensi basis pendapatan sebesar rata-rata 0,61, meskipun masih tergolong cukup tinggi dikarenakan masih lebih dari setengah sumber pendapatan pemerintah kota Palembang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi namun nilai tersebut merupakan nilai paling rendah diantara seluruh pemerintah daerah di wilayah Sumbagsel, hal tersebut juga menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan kemampuan pemerintah kota Palembang dalam mengelolah sumber daya daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Sama halnya dengan pemerintah kota Bandar Lampung dan Jambi yang memiliki nilai rasio antarpemerintah pada dimensi basis pendapatan yang cukup rendah dibandingkan dengan pemerintah kota lainnya pada wilayah sumbagsel yaitu rata-rata sebesar

0,69 dan 0,73. Meskipun klaster ini memiliki kondisi keuangan yang paling baik, namun pemerintah kota Jambi memiliki pengelolaan utang daerah yang tidak baik ditandai dengan menurunnya seluruh indikator perhitungan pada dimensi struktur utang, penurunan paling signifikan terjadi pada *growth 2* (2020-2021) sebesar rata-rata 69%.

Kondisi keuangan pemerintah kabupaten pada wilayah Sumbagsel memiliki kecenderungan yang sama yaitu pemerintah kabupaten pada wilayah ini memiliki tingkat kemandirian keuangan yang masih sangat rendah dalam menghasilkan pendapatan yang berasal dari daerahnya, ditunjukkan dengan rendahnya nilai pada hasil perhitungan indikator rasio kemandirian dan rasio PAD per belanja pada dimensi basis pendapatan yaitu hanya berkisar pada 0,07-0,10, nilai tersebut menunjukkan kondisi dimana kontribusi PAD masih sangat rendah pada total pendapatan daerah dan dalam memenuhi belanja daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten pada wilayah sumbagsel ini masih sangat bergantung pada sumber dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi, hal ini ditunjukkan dengan tingginya nilai perhitungan indikator rasio antarpemerintahan pada dimensi basis pendapatan yaitu berkisar pada rata-rata 0,84-0,91, dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa hampir sepenuhnya total pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan provinsi.



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

**Gambar 2. Grafik Dimensi Basis Pendapatan**

Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah pada wilayah Sumbagsel ini dibagi menjadi 6 klaster pemerintah kabupaten, dimana pemerintah kabupaten yang berada pada klaster 1 yaitu sebanyak 33 pemerintah kabupaten atau bisa dikatakan lebih dari 50% pemerintah kabupaten yang berada pada wilayah sumbagsel berada pada klaster ini, di mana 21 pemerintah kabupaten pada klaster ini menunjukkan kondisi tidak baik pada pengelolaan utang yang ditunjukkan dengan menurunnya arah tren pada seluruh indikator perhitungan dimensi struktur utang yaitu rata-rata sebesar 16-94% dari tahun awal (2019) ke tahun akhir (2023). Meskipun lebih dari 50% pemerintah kabupaten pada klaster 1 memiliki pengelolaan utang yang buruk akan tetapi ada 7 pemerintah kabupaten yang memiliki pengelolaan utang yang baik yaitu pemerintah kabupaten Way Kanan, Kerinci, Mukomuko, Lebong, Seluma, Bungo dan Rejang Lebong, dimana arah tren yang meningkat menunjukkan kondisi yang baik pada seluruh indikator perhitungan dimensi struktur utang pemerintah kabupaten tersebut. Peningkatan paling signifikan cenderung terjadi pada *growth 2* (2020-2021) yaitu rata-rata sebesar 726%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten tersebut memiliki pengawasan serta pengelolaan yang baik terhadap kewajiban yang dimiliki baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta mampu memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo dan memiliki keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kapasitas utang.

Selain pengelolaan utang yang kurang baik, pemerintah kabupaten pada klaster ini juga cenderung memiliki kemampuan yang kurang baik pula dalam menghasilkan pendapatan

daerah ditandai dengan arah tren yang tidak baik pada dimensi basis pendapatan, akan tetapi ada 3 pemerintah kabupaten yang menunjukkan arah tren yang baik pada dimensi basis pendapatannya yaitu pemerintah kabupaten Lampung Selatan, Bangka Tengah dan Mesuji dimana terjadi peningkatan dan penurunan sebesar rata-rata 19% dari tahun awal (2019) ke tahun akhir (2023), hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah kabupaten tersebut dalam meningkatkan pendapatan daerah yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam menjalankan operasional daerahnya serta menunjukkan adanya usaha pemerintah kabupaten dalam menghasilkan PAD. Akan tetapi ada 1 pemerintah kabupaten pada klaster ini yang memiliki kondisi keuangan sangat buruk yaitu pemerintah kabupaten Kaur dimana terjadi peningkatan dan penurunan sebesar rata-rata 41% dari tahun awal (2019) ke tahun akhir (2023) pada seluruh indikator perhitungan sehingga menunjukkan arah tren yang tidak baik. Hal ini perlu menjadi perhatian penuh pemerintah kabupaten Kaur karena dapat menyebabkan defisit anggaran, membatasi kemampuan pemerintah untuk mendanai program-program penting, menimbulkan utang daerah yang terus meningkat tanpa kontrol, serta fleksibilitas tingkat layanan yang rendah akan menghambat kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat yang mendesak.

Pada klaster 2 hanya ada 1 pemerintah kabupaten yaitu pemerintah kabupaten Lahat, dimana kondisi keuangan pada klaster ini memiliki kecenderungan yang hampir sama dengan pemerintah kabupaten yang berada pada klaster 1, akan tetapi pemerintah kabupaten ini memiliki arah tren yang baik pada dimensi fleksibilitas tingkat layanan ditandai dengan meningkatnya perhitungan dari tahun awal (2019) ke tahun akhir (2023) pada indikator pendapatan per kapita sebesar 21%, indikator fleksibilitas keuangan sebesar 4% dan penurunan pada indikator pemeliharaan infrastruktur sebesar 35%. Peningkatan dan penurunan tersebut menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Lahat untuk memberikan layanan kepada masyarakat, menunjukkan fleksibilitas keuangan dalam operasional untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dan menunjukkan terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana yang baik untuk mempertahankan layanan kepada masyarakat.

Pada klaster 3 pemerintah kabupaten wilayah Sumbagsel terdiri 6 pemerintah kabupaten dimana pada klaster ini dimensi struktur utang cenderung memiliki kondisi yang tidak baik ditandai dengan 5 pemerintah kabupaten memiliki pengelolaan utang yang buruk. Pada pemerintah kabupaten Tulang Bawang dimensi struktur utang arah tren pada seluruh indikator perhitungannya mengalami penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan terus meningkatnya jumlah total kewajiban yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Pada Pemerintah Kabupaten Bangka dimensi struktur utang mengalami penurunan yang sangat signifikan pada *growth* 4 (2022-2023) yaitu sebesar rata-rata 86%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Bangka memiliki total kewajiban paling tinggi, pada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Lampung Tengah mengalami penurunan dimensi struktur utang yang cukup signifikan pada *growth* 1 (2019-2020) sebesar rata-rata 85% dan 42% dikarenakan tingginya total kewajiban pada tahun 2020 hal ini menunjukkan bahwa kedua pemerintah kabupaten tersebut paling terpengaruh oleh kondisi Indonesia yang saat itu terkena pandemi Covid-19 sehingga membuat pemerintah kabupaten tidak mampu menghasilkan pendapatan daerah yang cukup dan pada akhirnya membuat pemerintah kabupaten tersebut menambah jumlah utangnya agar dapat memenuhi kewajiban dan kebutuhan operasional daerahnya. Kemudian pemerintah kabupaten Belitung Timur juga mengalami penurunan dimensi struktur utang yang cukup signifikan pada *growth* 4 (2022-2023) sebesar rata-rata 52%, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kewajiban pemerintah daerah lebih dari 100%.

Namun pada pemerintah kabupaten Belitung memiliki pengelolaan utang baik dikarenakan rata-rata arah tren indikator perhitungan dimensi struktur utangnya cenderung meningkat, dimana peningkatan paling signifikan terjadi pada *growth* 3 (2021-2022) sebesar

rata-rata 234%, peningkatan tersebut terjadi karena pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Belitung memiliki total kewajiban paling rendah sehingga menunjukkan adanya upaya peningkatan kemampuan kabupaten tersebut dalam memenuhi semua kewajiban daerahnya serta menunjukkan adanya keseimbangan antara kapasitas pendapatan yang diperoleh daerah dengan kapasitas utang yang dimiliki.

Pada klaster 4 terdapat 3 pemerintah kabupaten, dimana pada klaster ini pemerintah kabupaten memiliki pengelolaan utang yang cukup baik dibandingkan dengan klaster lain, ditandai dengan arah tren yang cenderung meningkat pada seluruh indikator perhitungan dimensi struktur utang pemerintah kabupaten Sarolangun dan Panukan Albab Lematang Ilir, dimana pada kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan yang signifikan pada *growth 3* (2021-2022) yaitu sebesar rata-rata 779% dan pemerintah Kabupaten Panukan Albab Lematang Ilir pada *growth 2* (2020-2021) yaitu sebesar rata-rata 6306%, menunjukkan bahwa kedua pemerintah kabupaten tersebut mampu memenuhi semua kewajiban dan beban utangnya pada saat jatuh tempo baik menggunakan pendapatan tahunan atau menggunakan asset yang dimiliki. Akan tetapi pada pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara seluruh indikator perhitungan pada dimensi struktur utang menunjukkan tren yang tidak baik dikarenakan adanya penurunan yang signifikan pada *growth 1* (2019-2020) sebesar rata-rata 98% sehingga arah trennya memiliki kecenderungan yang menurun. Meskipun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 namun pada 3 tahun setelahnya arah tren tersebut berangsur meningkat, meski sangat kecil dan tidak mampu kembali ke nilai tahun dasar tetapi hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Musi Rawas Utara pada pengelolaan utang daerahnya.

Pada klaster 5 terdapat 5 pemerintah kabupaten dimana dimensi struktur utang pemerintah kabupaten Banyuasin dan Muaro Jambi menunjukkan tren yang tidak baik ditandai dengan penurunan pada seluruh indikator perhitungannya, dimana penurunan yang paling signifikan terjadi pada *growth 1* (2019-2020) yaitu lebih dari 50%, meskipun setelah itu terjadi usaha peningkatan pada dimensi struktur utang tetapi tergolong sangat rendah. Berbanding terbalik dengan pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana dimensi struktur utangnya menunjukkan arah tren yang baik dengan peningkatan yang paling signifikan terjadi pada *growth 3* (2021-2022) sebesar rata-rata 183%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pengelolaan struktur utang yang paling baik pada klaster 5. Pemerintah kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin pada dimensi kebutuhan masyarakat dan sumber daya menunjukkan arah tren yang baik dimana meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tidak membuat tingkat pengangguran pada kedua kabupaten tersebut meningkat, dimana *range* nilai tingkat pengangguran pada klaster ini masih berada pada batas wajar tingkat pengangguran yaitu masih pada *range* 4%-6%, hal tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan pada produktivitas masyarakat di kedua kabupaten tersebut.

Pada klaster 6 terdiri dari 2 pemerintah kabupaten yaitu pemerintah kabupaten Musi Rawas dan Batanghari. Pada pemerintah kabupaten Musi Rawas terdapat 3 dari 7 indikator perhitungan pada dimensi struktur utang yang menunjukkan arah tren tidak baik yaitu rasio kas pemerintah, rasio kas dan piutang dan rasio asset lancar, hal ini dikarenakan terus menurunnya jumlah kas dan setara kas yang dimiliki pemerintah kabupaten Musi Rawas, penurunan paling signifikan terjadi pada akhir periode yaitu pada *growth 4* (2022-2023) sebesar rata-rata 37%, sehingga menunjukkan adanya penurunan kemampuan pemerintah kabupaten Musi Rawas dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu dan pada saat jatuh tempo. Sedangkan pada pemerintah kabupaten Batanghari seluruh indikator perhitungan pada dimensi struktur utang menunjukkan arah tren yang tidak, namun pada *growth 2* (2020-2021) terjadi peningkatan yang paling signifikan pada seluruh indikator perhitungannya sebesar rata-rata 4184%, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 pemerintah kabupaten Batanghari memiliki

kewajiban jangka pendek dan total kewajiban paling rendah dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Namun pada dimensi kebutuhan masyarakat dan sumber daya menunjukkan arah tren yang baik dimana meningkatnya indikator jumlah populasi dan kepadatan penduduk tidak membuat tingkat pengangguran pada kedua kabupaten tersebut meningkat serta nilai tingkat penganggurannya pada kedua kabupaten ini masih berada pada batas wajar tingkat pengangguran yaitu 3,46-4,10% dimana nilai tersebut sudah mencapai target sasaran pokok dari tingkat pengangguran terbuka yang telah ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar 4-5%. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada produktivitas masyarakat di kedua kabupaten tersebut.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroiti kondisi keuangan pemerintah daerah di wilayah Sumbagsel yang menunjukkan beberapa perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah kota dan kabupaten. Temuan dalam penelitian ini adalah lebih dari 50% pemerintah daerah di Sumbagsel baik itu pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten menunjukkan pengelolaan utang yang tidak baik ditandai dengan cenderung menurunnya tren seluruh indikator pada dimensi struktur utang. Kemudian tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten di wilayah Sumbagsel tergolong lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kota yang ditunjukkan dengan arah tren yang tidak baik pada dimensi basis pendapatan seperti tingginya nilai perhitungan pada indikator rasio antarpemerintah sebesar rata-rata 0,84-0,91 dan rendahnya nilai perhitungan rasio kemandirian dan rasio PAD per belanja sebesar rata-rata 0,07-0,10, yang membuat pemerintah kabupaten sangat bergantung pada sumber dana dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga berpotensi menghambat kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dan masyarakat.

Pada Dimensi Fleksibilitas tingkat layanan pemerintah kota dan kabupaten cenderung memiliki kondisi yang sama, dimana lebih dari 50% pemerintah kota dan kabupaten menunjukkan tren yang tidak baik pada seluruh indikator perhitungan dimensi fleksibilitas tingkat layanan sehingga menunjukkan rendahnya kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam menyediakan layanan kepada masyarakat dan rendahnya kemampuan pemerintah daerah wilayah Sumbagsel dalam memelihara sarana prasarana untuk mempertahankan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian pada dimensi kebutuhan masyarakat dan sumber daya pemerintah kota cenderung memiliki kondisi yang tidak baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dikarenakan pemerintah kota menghadapi tantangan pada indikator tingkat pengangguran dengan nilai yang tinggi yaitu sebesar rata-rata 5,33-7,04%, dimana nilai tersebut berada diatas batas wajar tingkat pengangguran di Indonesia yang telah ditetapkan Kemnaker sebesar 4-5%.

Penelitian ini menekankan pentingnya analisis kondisi keuangan yang mendalam bagi pemerintah daerah wilayah Sumbagsel untuk mengidentifikasi masalah potensial yang dapat menghambat perkembangan daerah dan meningkatkan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan terkait kebijakan keuangan pemerintah daerah di masa mendatang. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Sumbagsel, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat dilakukan sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumbagsel.

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah Pemerintah daerah di wilayah Sumbagsel perlu melakukan evaluasi berkala terhadap struktur utang dan memastikan bahwa utang yang diambil dapat dikelola dengan baik serta pemerintah daerah wilayah Sumbagsel juga perlu meningkatkan pengelolaan utang dengan membatasi utang tidak produktif dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk program berdaya guna, serta meningkatkan kemandirian keuangan dengan mengembangkan sektor ekonomi lokal dan

memaksimalkan pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada dana pusat dan provinsi. Selain itu, pemerintah daerah wilayah Sumbagsel perlu melakukan optimalisasi terhadap layanan publik dengan efisiensi pengelolaan anggaran untuk memastikan pemeliharaan fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Kemudian pada pemerintah kota perlu mengambil langkah serius untuk mengurangi tingkat pengangguran dengan program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja. Reformasi kebijakan keuangan secara berkala juga diperlukan agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi yang berubah, disertai diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sedikitnya ketersediaan data demografi yang dapat diakses sehingga hanya sedikit indikator dari faktor lingkungan model SPTK yang dapat digunakan, selain itu belum adanya klasterisasi tetap pemerintah daerah pada wilayah Sumbagsel membuat peneliti harus mengelompokkan pemerintah daerah terlebih dahulu sebelum melakukan analisis kondisi keuangan. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambah indikator perhitungan dari faktor lingkungan dan memperluas jangkauan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih kompleks terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

## REFERENSI

- Aziza, N. (2023). *Metodologi Penelitian 1 : Deskriptif Kuantitatif* (pp. 166–178).
- Baidori, B. (2020). PENGKLASTERAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA DAN BALI BERDASARKAN VARIABEL SOSIOEKONOMI (KOMPARASI LAPORAN KEUANGAN DAERAH). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.22146/abis.v2i3.59364>
- Frans Marhuasa Simamora, A., Deliana, D., & Hidayah Napitupulu, I. (2024). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(4 SE-Articles), 795–811. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4.799>
- ICMA. (2009). *Financial Trends Monitoring System*. ICMA. [https://icma.org/sites/default/files/101456\\_.pdf](https://icma.org/sites/default/files/101456_.pdf)
- Kemnaker. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019*. Pusat Pelayanan Informasi PPIID Utama Kementerian Ketenagakerjaan RI. [https://ppid.kemnaker.go.id/uploads/informasi\\_publik/944760332.pdf](https://ppid.kemnaker.go.id/uploads/informasi_publik/944760332.pdf)
- Kusnadhi, F. H., & Ritonga, I. T. (2017). Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v5i1.59310>
- Maizunati, N. A. (2017). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota Di Jawa-Bali. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 139–162.
- Maulina, F., & Rhea, R. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Obis*, 2(1), 11–22.
- Mifrahi, M. N., & Darmawan, A. S. (2022). Analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode sebelum dan saat pandemi covid-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 111–118. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art11>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp->
- Primawaty, A. (2020). ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA TAHUN 2011–2015. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i1.59293>
- Priyono, N., Fatimah, A. N., Bharata, R. W., & Arifah, S. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) Di Kota

- Magelang. *Journal of Public and Business Accounting* 2, 1(2), 1–11.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (sutopo (Ed.); Edisi Kedu). Alfabeta.
- Rahayu, S., Yudi, Y., & Rahayu, R. (2023). Local government performance: financial condition perspective. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 10(6 SE-Articles), 395–408. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i6.11779>
- Ritonga, I. T. (2023). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH* (Kedua). PUSTAKA PELAJAR.
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia: an Exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2), 37–50.
- Rivenbark, W. C., Roenigk, D. J., & Allison, G. S. (2010). Conceptualizing Financial Condition In Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 22(2), 149–177. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-22-02-2010-B001>
- Teguh Ali Fikri, Y. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 107–116. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.59>
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022). JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>